

IMPLEMENTASI TAHAPAN PRA-BENCANA DALAM PROGRAM DESA TANGGUH BENCANA DI KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN BOGOR

Nadira Putri Zahra*, Juliannes Cadith

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: nadirazahra708@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis Implementasi Program Desa Tangguh Bencana pada tahapan pra-bencana di Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Kabupaten Bogor secara geografis dan topografis sebagian besar berupa dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan serta dialiri oleh 6 DAS sehingga menjadi titik berpotensi bencana tinggi. Selama 5 tahun terakhir, Kecamatan Caringin menduduki peringkat tertinggi zona merah rawan bencana di Kabupaten Bogor. Untuk mengantisipasi tantangan tersebut, BNPB mengeluarkan sebuah Program berbasis relawan, Program Desa Tangguh Bencana (Destana) sebagai program yang dapat mempersiapkan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi literatur. Pengambilan informan menggunakan teknik *purposive sampling snowball* dan analisis data dilakukan menggunakan teknik reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan data serta model implementasi Grindle. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Destana dalam tahapan pra-bencana di Kecamatan Caringin sudah berjalan dengan baik dengan pembentukan tim relawan destana di masing-masing desa berdasarkan surat keputusan kepala desa, penyaluran dana dari APBDes, hingga pelatihan yang diberikan oleh BPBD namun masih terdapat beberapa tantangan seperti kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya relawan, penyebaran program yang belum sampai ke lapisan rumah tangga dan partisipasi masyarakat yang minim.

Kata Kunci: Implementasi, Program Destana, Kecamatan Caringin, BPBD Kabupaten Bogor.

Abstract. This study aims to analyze the implementation of the Disaster Resilient Village Program in pre-disaster stage in Caringin District, Bogor Regency and identify several factors in the implementation. Bogor Regency is geographically and topographically highlands, hills, and mountains with 6 watersheds, making it a high disaster risk. In 5 years prior, Caringin District has ranked as the red zone for the highest disaster risk. To anticipate this challenge, BNPB launched a volunteer-based program, The Disaster Resilient Village Program that can prepare society for disaster. The research method is descriptive qualitative approach with data collection, through interviews, observation, documentation and literature studies. Informants were taken using the snowball purposive sampling technique and data analysis is carried by using data reduction, presentation, and conclusion with Grindle's Implementation model. The results of this study show the implementation of Destana Program in the pre-disaster stage in Caringin District is running good with the formation of program's teams in villages based by village head's decree, distribution funds from the village budget, and training provided by BPBD. However, there are still several challenges such as lack of training and Capacity development of human resource, program has not yet reached the household level and minimal community participation.

Keywords: Implementation, Destana Program, Caringin District, Bogor Regency's BPBD.

Copyright©2026. Nadira Putri Zahra, Juliannes Cadith
This is an open access article under the CC-BY NC-SA license

PENDAHULUAN

World Risk Report mengeluarkan laporan yang diliris oleh Bündnis Entwicklung Hilft dan Institute for International Law of Peace and Armed Conflict IFHV of the Ruhr-University Bochum yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara rawan bencana ke-3 di dunia dengan skor World Risk Index sebesar 41,46 (Atwii et al., 2022).

kondisi dan wilayah Indonesia dari aspek geografis, demografis, sosiologis, dan historis menjadikan Indonesia sebagai daerah yang rawan dari potensi bencana baik bencana alam, bencana non-alam maupun bencana sosial. Posisi geografis Indonesia yang terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dan berada pada Kawasan *ring of fire* menjadikan wilayah Indonesia rentan terhadap berbagai bencana seperti gempa bumi, tsunami, benturan gunung berapi, banjir hingga tanah longsor. Mengingat frekuensi bencana yang semakin meningkat, pemerintah Indonesia diharapkan mengambil Langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi dan menghadapi bencana tersebut secara efektif dan efisien.

Sebagai pulau dengan populasi terbesar di Indonesia, Pulau Jawa diketahui menjadi pulau yang lebih maju pembangunannya dan menjadi pusat industri. Oleh karena itu Pulau Jawa tentu saja memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pulau-Pulau lain di Indonesia. Berikut merupakan tabel perbandingan bencana alam yang dialami oleh Provinsi-Provinsi yang ada di Pulau Jawa:

Tahun	Provinsi					
	Banten	Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	Yogyakarta	Jawa Timur
2022	80	17	824	488	29	400
2023	62	17	844	629	176	134
2024	45	13	256	212	14	299
2025	58	23	530	235	24	341
Total	245	70	2454	1564	243	1174
x	61,25	17,5	613,5	391	60,75	293,5

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa dalam empat tahun terakhir Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah bencana alam terbanyak dengan total 2454 bencana alam dengan rata-rata 613 bencana alam setiap tahunnya. Provinsi Jawa Barat memiliki luas wilayah 35.377,75 km² dengan 27 kabupaten/kota, 627 Kecamatan, dan 5.957 desa. Jawa Barat memiliki struktur geologi yang kompleks dengan wilayah pegunungan di bagian tengah dan selatan dan dataran rendah di wilayah utara. Curah hujan berkisar antara 2000-4000 mm/th dengan tingkat intensitas hujan yang tinggi. Jawa Barat memiliki 40 Daerah Aliran Sungai (DAS) dan terdapat 17 gunung yang berada di Provinsi Jawa Barat (Pergub Jawa Barat, 2022). Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2022, Provinsi Jawa Barat memiliki indeks risiko 131,62 yang termasuk ke dalam kategori sedang (W. Adi et al., 2023). Setara dengan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2025, jumlah penduduk Jawa Barat paling besar berada di wilayah Kabupaten Bogor. Dengan luas geografis sebesar 7,66 persen wilayah Jawa Barat, Kabupaten Bogor dihuni oleh 5,63 juta penduduk atau 11,29 persen penduduk Jawa Barat.

Berdasarkan Buku Indeks Risiko Bencana, Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki daerah rawan bencana alam. Wilayah Kabupaten Bogor secara geografis dan topografis sebagian besar berupa dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan serta memiliki curah hujan tinggi dan dialiri 6 Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga ketika musim penghujan tiba, potensi bencana alam diperkirakan kian tinggi. Sebagian besar bencana alam yang terjadi di Kabupaten Bogor merupakan bencana hidrometeorologi yang sering terjadi di musim penghujan seperti bencana

tanah longsor, banjir, angin puting beliung yang berpotensi terhadap kerugian materil maupun non materil.

Fakta tersebut selaras dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Berdasarkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, pada tahun 2022 Kabupaten Bogor mengalami total 1.147 bencana alam. Kemudian pada tahun 2023 Kabupaten Bogor mengalami kenaikan dengan total 2.163 bencana alam. Diikuti dengan 1.711 bencana yang terjadi pada tahun 2024 serta 1.826 bencana yang terjadi pada tahun 2025. Artinya selama empat tahun terakhir Kabupaten Bogor sudah mengalami total 6.842 bencana alam dengan rata-rata 1.711 bencana alam setiap tahunnya.

Kecamatan Caringin yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bogor merupakan lokasi yang relevan untuk mengkaji implementasi Program Destana dalam tahapan pra-bencana. Hal ini dilandaskan dari banyaknya bencana yang terjadi di Kecamatan caringin dari tahun 2020 hingga 2025 dimana Kecamatan Caringin menjadi kecamatan yang menduduki peringkat teratas zona merah rawan bencana. Kecamatan Caringin termasuk dalam Kecamatan di Kabupaten Bogor yang sering mengalami bencana alam. Bencana alam yang sering terjadi di Kecamatan Caringin meliputi gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, banjir bandang, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin puyuh atau puting beliung atau topan, gelombang pasang, hingga abrasi.

Bencana yang kian terjadi di Kecamatan Caringin disebabkan oleh faktor geografis berbukit, cuaca ekstrem dan dampak aktivitas manusia. Caringin terletak di wilayah perbukitan dengan tebing curam dan tanah yang labil, yang membuat wilayahnya rawan longsor dan pergeseran tanah. Selain itu, kecamatan caringin juga berada pada titik pergerakan sesar aktif dengan insitas hujan yang tinggi yang menjadi pemicu utama bencana di wilayah ini. Aktivitas manusia seperti alih fungsi lahan, kurangnya dinding penahan tebing, serta penyempitan drainasi juga menjadi penyebab seringnya bencana terjadi. Terdapat 12 desa di Kecamatan Caringin. Meskipun banyaknya bencana yang terjadi, belum ada sistem peringatan dini bencana dan perlengkapan keselamatan yang lengkap di tiap-tiap desa.

Pemahaman tentang bahaya, keterpaparan dan kerentanan bencana penting untuk perencanaan mitigasi bencana yang efektif. Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mitigasi bencana dilaksanakan pada situasi tidak ada bencana dan juga pada saat potensi bencana terjadi. Hal tersebut diwujudkan dalam kegiatan mitigasi bencana agar masyarakat dapat mempersiapkan diri sebelum bencana terjadi.

Mitigasi bencana merupakan upaya yang dilakuakn untuk mengurangi risiko bencana dan terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu; pra-bencana, saat bencana, dan pasca-bencana. Tahapan pra-bencana merupakan tahapan krusial karena pada tahapan ini dilakukan persiapan dan perencanaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Pada tahap ini, masyarakat dapat memahami potensi wilayah bencana, mengurangi risiko bencana, dan meningkatkan kapasitas diri untuk menghadapi bencana. Beberapa wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan bencana adalah dengan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana yang selaras dengan kebijakan terkait pembangunan nasional. Salah satu kebijakan mitigasi bencana dalam mengurangi atau menghilangkan risiko bencana ini diwujudkan oleh program Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yaitu Desa Tangguh Bencana atau Destana dimana penanggulangan bencana dilakukan dengan pembentukan relawan berbasis masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dapat mengetahui ancaman, bahaya maupun potensi bencana yang berada di lokasi di sekitar tempat tinggalnya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menindaklanjuti amanat Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana membuat suatu kebijakan berupa program dalam antisipasi bencana di tingkat daerah yang kemudian akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yaitu Program Desa Tangguh Bencana. Program ini dilandaskan dalam Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Desa Tangguh Bencana yang menyatakan bahwa yang termasuk ke dalam desa Tangguh bencana merupakan desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Program Destana bertumpu pada prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK) yang menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam perencanaan dan penanggulangan bencana dengan dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Program Desa Tangguh bencana ini diharapkan dapat memberikan kemajuan kepada masyarakat berupa pengembangan *skill* dalam upaya penanggulangan bencana, pengetahuan terkait fisik lingkungan serta tata cara pembangunan yang sesuai dengan analisis pengurangan risiko bencana.

Dalam penelitian ini, Kecamatan Caringin menjadi fokus penelitian dikarenakan Kecamatan Caringin merupakan Kecamatan dengan bencana terbanyak selama tiga tahun terakhir berdasarkan laporan infografis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor. Selain itu, pembentukan Destana di Kecamatan Caringin sudah serentak dilakukan di keseluruhan 12 desa pada tahun 2025. Terlepas dari dampak positif yang dihasilkan, implementasi Program Destana di Kecamatan Caringin masih menghadapi sejumlah tantangan dimana rendahnya kapasitas masyarakat yang tergabung ke dalam tim relawan Destana, rendahnya kapasitas masyarakat, sosialisasi yang belum sampai ke lapisan rumah tangga merupakan Sebagian dari beberapa tantangan tersebut.

Berangkat dari permasalahan yang terjadi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tahapan pra bencana dalam Program Destana di Kecamatan Caringin berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa atau Kelurahan Tangguh Bencana dengan menitikberatkan pada aspek isi kebijakan dan konteks implementasi program.

Literature Review

Kebijakan Publik Menurut Thomas R. Dye sebagaimana dikutip dalam Buku *Public Policy* oleh Riant Nugroho (2017) dalam Indra Fahmi, kebijakan publik didefinisikan sebagai “*whatever governments choose to do or not to do*”. Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pengertian tersebut merujuk pada bahwasannya pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pilihan terhadap masalah yang timbul atau capaian yang ingin dituju dari kebijakan yang dibuat (Dasuki & Amran, 2018). Abdul Wahab (2008) dalam buku *Analisis Implementasi Kebijakan Publik* oleh Karmanis dan Karjono (2020:16) implementasi kebijakan berfungsi untuk menciptakan hubungan yang mendukung pencapaian tujuan ataupun sasaran kebijakan negara, sehingga dapat diwujudkan sebagai hasil akhir dari berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintah. Oleh karena itu, fungsi implementasi juga mencakup pembetulan apa yang dikenal dengan ilmu kebijakan negara (*policy science*) sebagai “*policy delivery system*” atau system penyampaian kebijakan negara.

Model implementasi Merilee S. Grindle “*Implementation as Administrative and political Process*”, sebagaimana dikutip Lindawati dan Rahman (2023) mengadopsi pendekatan *top-down* dimana implementasi sebagai *direct and indirect impact on implementation*. Model ini menjelaskan bahwa dalam mencapai tujuan yang akan dicapai harus terdapat *impact* atau efek berupa perubahan baik secara individu maupun kolektif di dalam masyarakat. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu: isi kebijakan (*content of policy*) dengan sub-variabel berupa: kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program dan sumber daya yang digunakan, serta lingkungan kebijakan (*context of implementation*) dengan sub-variabel; Kekuatan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat, karakteristik Lembaga atau rezim yang berkuasa, dan tingkat kepatuhan dan respon pelaksana.

Mitigasi bencana berdasarkan buku Mitigasi dan Lingkungan oleh Fajar Susanti, dkk (2024:1) diartikan sebagai berbagai macam tindakan yang diambil sebelum suatu peristiwa terjadi yang akan mencegah penyakit, cedera, dan kematian serta membatasi kerugian harta benda. Kegiatan penanganan bencana dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu: kegiatan pra-bencana, saat bencana, dan kegiatan pasca bencana. Adapun Program Desa Tangguh Bencana berdasarkan Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa atau Kelurahan Tangguh Bencana merupakan desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memisahkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Komponen Destana meliputi legislasi, penyusunan, kelembagaan, pendanaan, pengembangan kapasitas, dan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pengembangan Desa Tangguh Bencana merupakan salah satu upaya dalam pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat dalam artian segala bentuk upaya untuk mengurangi ancaman bencana dan kerentanan masyarakat, dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama.

Beberapa penelitian sebelumnya membahas Program Destana dan pengembangannya, penelitian yang dilakukan oleh Firman Kirana Moedani, dkk (2024) terkait Implementasi Desa Tangguh Bencana di Desa Cinta Asih Kabupaten Bandung yang menyatakan bahwa Program Destana belum optimal dilakukan karena perlindungan aset utama produktif masyarakat berupa pengarsipan dokumen penting masih terbatas, belum melakukan koordinasi kerjasama antar pelaku wilayah, dan belum merelokasi atau memperbaiki rumah warga yang rusak akibat tanah longsor. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Susilastuti, dkk (2025) dalam penelitian Program Destana sebagai Instrumen Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Kesiapsiagaan Bencana menyatakan bahwa Program Destana terbukti berperan dalam pemberdayaan masyarakat yang terstruktur dalam kesiapsiagaan bencana di Indonesia. Penelitian ini menyediakan kerangka konseptual yang terintegrasi dan mengaitkan teori pemberdayaan masyarakat berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat Tangguh bencana di seluruh Indonesia.

Keterbaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap kegiatan Pra-Bencana dalam mitigasi bencana meliputi persiapan dan perbekalan pelaksana kebijakan dalam Program Destana. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menekankan pada dampak yang dihasilkan dari Program Destana. Penelitian ini mengkaji kegagalan relatif dalam implementasi program, sehingga memberikan

perspektif baru dalam dinamika dan tantangan dalam tahapan Pra-bencana dalam Program Destana yang diimplementasikan.

Selain itu, penelitian ini mengkaji implementasi Program Destana berdasarkan regulasi yang berlaku yaitu Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa Tangguh Bencana dan SNI 8357:2017 tentang Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana dengan mempertimbangkan komponen-komponen dalam regulasi yang berlaku dengan kendala teknis dan operasional yang terjadi di lapangan seperti kendala dalam sosialisasi, penyelenggaraan relawan destana, dan anggaran Destana. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam melihat potensi wilayah desa dan risiko bencana wilayah kepada masyarakat sebagai aktor utama program serta memberikan rekomendasi dalam implementasi Program guna meningkatkan kualitas dan efisiensi Program Destana agar terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kecamatan Caringin.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan memaparkan kondisi objek penelitian secara rinci dan mendalam. Instrumen utama dalam penelitian berperan sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, dan pelapor hasil penelitian, dibantu oleh wawancara, catatan lapangan, dan studi literatur. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive dengan teknik bola salju (*snowball*) sebagai kemungkinan pengembangan dalam wawancara.

Dalam penelitian terkait implementasi Tahapan Pra-Bencana dalam Program Destana di Kecamatan Caringin digunakan beberapa teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengamati secara langsung kondisi dan kegiatan di lapangan, sedangkan wawancara dilakukan dengan daftar pertanyaan yang dikembangkan secara alami selama proses penelitian berlangsung.

Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan informasi dari buku dan tulisan yang relevan, sementara dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap agar data wawancara dan observasi lebih valid. Analisis data dilakukan menggunakan model Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (Miles et al., 2014) di antaranya reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan simpulan dan verifikasi data (*conclusion; drawing/verifying*).

HASIL DAN DISKUSI

Hasil penelitian akan dibahas dengan merujuk pada dua variabel besar berdasarkan model implementasi Merile S. Gridle "*Implementation as Political and Administrative Process*" yaitu konteks kebijakan dengan beberapa sub-indikator meliputi kepentingan yang terpengaruh, manfaat, perubahan yang dihasilkan, pengambilan keputusan, implementasi program, dan sumber daya serta indikator lingkungan pelaksana kebijakan dengan sub-indikator pelaksana kebijakan, karakteristik Lembaga atau rezim yang berkuasa dan respon masyarakat sebagai target kebijakan.

1. Interest Affected (Kepentingan yang Mempengaruhi)

Kepentingan yang mempengaruhi kebijakan berkaitan dengan keterlibatan aktor pelaksana dalam memberikan pengaruh terhadap implementasi. Program Destana yang dilaksanakan di Kecamatan Caringin dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan

potensi rawan bencana di wilayah Kecamatan Caringin dimana Kecamatan ini termasuk ke dalam zona merah rawan bencana nomor satu dari tiga tahun terakhir. Program Destana juga dibuat *based in needs* atau kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan ketangguhannya dalam menghadapi bencana dengan mempertimbangkan berbagai aspek penanggulangan bencana.

Program ini melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan implementasi Program Penanggulangan Bencana sesuai dengan Perka BNPB No. 1 2012 tentang Pedoman Umum Desa atau Kelurahan Tangguh Bencana dimana implementasi mencakup kolaborasi multi pihak (masyarakat desa atau kelurahan, pemerintah desa, BPBD, Fasilitator Destana, Kementrian atau Lembaga, Lembaga usaha atau perguruan tinggi, serta organisasi masyarakat). intervensi pemerintah dan pihak-pihak non pemerintah dalam Program Destana bersifat pasif dan lebih kurang semacam stimulan dalam kegiatan program. Masyarakat harus berperan aktif dan berperan sebagai insiator perencanaan dan pelaksana kebijakan.

Selama berjalannya Program Destana di Kecamatan Caringin, pihak-pihak yang berperan meliputi BPBD Kabupaten Bogor khususnya bidang pencegahan bencana dan analisis mitigasi bencana. BPBD Provinsi Jawa Barat mendorong BPBD tingkat Kabupaten atau Kota untuk mengembangkan Desa Tangguh Bencana. BPBD Kabupaten Bogor berperan dalam mendorong dan memfasilitasi desa-desa untuk merencanakan dan melaksanakan Program Destana. Selain itu, aparatur Kecamatan Caringin berperan sebagai pemimpin Program, koordinator, dan fasilitator untuk mendorong keberlangsungan Gerakan kebencanaan dari desa. Kecamatan Caringin juga diharapkan dapat membantu BPBD Kabupaten Bogor dalam memantau dan memberi bantuan teknis bagi pelaksanaan Program Destana.

Pelaku utama dalam Program Destana merupakan Pihak desa mulai dari aparat desa dan masyarakat khususnya sebagai pelaku utama, penggerak dan pelaksana kegiatan pengurangan risiko bencana secara mandiri. Adapun masyarakat yang ikut serta dalam Program Destana tergabung menjadi anggota relawan destana yang terbagi ke dalam grup relawan yang dibentuk di kedua belas desa Kecamatan Caringin. Aparatur desa khususnya Kepala Desa diberikan kewenangan penuh dalam implementasi Destana di masing-masing desa dengan masyarakat yang tergabung ke dalam tim unit destana sebagai penggerak program.

Pembentukan Destana di tiap-tiap Kecamatan harus serentak. Walau begitu ada kalanya hal tersebut tidak terpenuhi dan tidak dijalankan dengan baik, seperti pembentukan destana di Kecamatan Caringin yang tidak serentak dan dimulai hanya pada 2 desa yaitu Desa Ciherang Pondok dan Desa Lemah Duhur sementara 10 desa lainnya baru dibentuk pada tanggal 25 Juni 2025. Selain itu, masih banyak kepentingan yang belum mampu diakomodir melalui pedoman-pedoman yang sudah terbentuk. Seperti kurangnya pengembangan kapasitas melalui kegiatan ataupun pelatihan rutin yang dilakukan oleh tim relawan destana yang menyebabkan kurangnya potensi dan keahlian sumber daya manusia dalam Program Destana.

2. Type of Benefits (Tipe manfaat yang diperoleh)

Menurut Khusumafwati (2020), Sutu kebijakan yang dibuat harus memberikan dampak positif berupa manfaat yang dapat merubah ke arah yang lebih baik serta dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat. Program Destana sudah mampu dalam membantu masyarakat Kecamatan Caringin untuk persiapan bencana

dimana masyarakat mulai mengerti apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan saat menghadapi bencana. Selain itu, Program Destana juga membantu masyarakat dalam mempersiapkan diri dan lingkungan dalam menghadapi bencana dan dapat membantu masyarakat dalam persebaran informasi terkait destana. Program Destana juga sudah secara legal dikokohkan dengan surat keputusan dari masing-masing kepala desa yang ada di Kecamatan Caringin. Program destana juga dapat menjadi acuan pengalokasian anggaran untuk kegiatan destana mulai dari pelatihan dan peningkatan kapasitas relawan-relawan destana.

Selama Program berlangsung, target manfaat yang ingin dihasilkan oleh para pelaksana dalam Program Destana di Kecamatan Caringin memiliki kesesuaian dengan aturan yang menjadi dasar kebijakan. Program Destana di Kecamatan Caringin telah membawa dampak yang sangat signifikan dan positif bagi masyarakat. Salah satu manfaat yang paling menonjol adalah peningkatan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana. Melalui program ini masyarakat mengetahui bagaimana untuk melaporkan bencana dan dampak-dampak bencana dan koordinasi lapangan ketika terjadi bencana. Oleh karena itu, peneliti juga melihat bahwa proses implementasi kebijakan berjalan sudah cukup baik melalui indikator manfaat ini. Melalui Program Destana, masyarakat beralih menjadi pelaku utama dalam upaya mitigasi bencana di lokasinya. Meskipun begitu, perkembangan destana juga memiliki kekurangan dalam merangkul seluruh lapisan masyarakat dalam penyebarannya. Hal ini dikarenakan target dalam penyebaran destana masih bertuju pada relawan atau tim destana saja.

3. *Extent of change Envision (Derajat Perubahan yang Diinginkan)*

Merilee S. Grindle (1980) menjelaskan bahwa setiap kebijakan memiliki target yang hendak dicapai. Derajat perubahan yang ingin dicapai melalui implementasi program destana dalam pra-mitigasi bencana tercantum dalam SNI 3857:2017 Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana yang merumuskan pedoman penerapan desa atau kelurahan Tangguh bencana yang menjadi acuan untuk pengelolaan risiko berbasis masyarakat dimana disebutkan bahwa derajat perubahan menyangkut perubahan dalam pengetahuan dan kesadaran masyarakat; perubahan sikap dan perilaku masyarakat dan pemerintah kecamatan; perubahan dalam kelembagaan; perubahan dalam kebijakan dan regulasi, serta; perubahan dalam alokasi sumber daya.

Implementasi Program Destana di Kecamatan Caringin dapat dikatakan menghasilkan perubahan yang terlihat dan nyata dimana masyarakat sudah memahami dan mengetahui cara menghadapi bencana dengan lebih baik, sehingga masyarakat dapat mengambil tindakan yang cepat dan tepat ketika bencana terjadi. Koordinasi lapangan juga telah efektif terjadi antar masyarakat, aparatur pemerintahan, dan lembaga terkait seperti BPBD Kabupaten Bogor dan Unit Siaga SAR Bogor. Koordinasi lapangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan respons dan penanganan bencana menjadi lebih efisien dan efektif, serta mengurangi risiko dan dampak yang dihasilkan dari bencana. Pada akhirnya program destana sudah dapat meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana dan memperbaiki kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Meskipun begitu, dalam mewujudkan perubahan yang diinginkan pada Program Destana di Kecamatan Caringin terdapat beberapa kendala tersendiri yang signifikan yang perlu diatasi, seperti perbedaan pendapat antar pemegang wewenang seperti kepala desa, aparatur Kecamatan Caringin, dan BPBD Kabupaten Bogor. Hal ini tentu menyebabkan kesenjangan dalam pengambilan keputusan dan implementasi program.

Selain itu, partisipasi masyarakat yang belum menyeluruh dan merata juga menjadi kendala dalam Program Destana di Kecamatan Caringin sehingga beberapa kelompok masyarakat belum dapat dijangkau dalam pengembangan Program Destana yang menghambat proses perubahan dan mengurangi efektivitas program secara keseluruhan sehingga perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar pemegang wewenang serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Program Destana di Kecamatan Caringin.

4. Site of Decision Making (Letak Pengambilan Keputusan)

Letak pengambilan keputusan tentunya sangat erat dengan kewenangan para *stakeholders*: dalam hal ini Program Destana pemegang keputusannya tersebar dari tingkat atas hingga masyarakat. Dalam Program Destana yang di Kecamatan Caringin, BPBD Kabupaten Bogor berperan sebagai agen teknis untuk menyampaikan hasil kebijakan yang diturunkan oleh BNPB dengan mengkoordinasikan seluruh pemangku kepentingan. BPBD Kabupaten Bogor juga memberikan dukungan teknis dengan memberikan bimbingan dalam teknik pemetaan desa rawan bencana dan memonitori keberlanjutan Program dan risiko bencana di tiap-tiap lokasi rawan bencana.

Letak pengambilan keputusan dalam Program Destana berada di tangan Kepala Desa yang mengatur ketentuan dalam implementasi Program Destana dalam koordinasi kepada masyarakat. Kepala desa memiliki peran yang sangat penting dalam program Destana sebagai pemegang keputusan dimana kepala desa memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menentukan arah dan kebijakan Program Destana di desanya. Kepala desa dapat memfasilitasi dan memobilisasi sumber daya yang ada di desa, baik sumber daya manusia dan sumber daya logistik guna mendukung program-program mitigasi bencana. Sebagai Pemangku kepentingan dalam Program Destana di Kecamatan Caringin, kepala desa memberikan suatu bentuk keputusan atas hasil Program yang dijalankan berupa Surat Keputusan Kepala Desa.

Surat Keputusan Kepala Desa berisikan pengkoordinasian pelaksanaan Destana di masing-masing desa di Kecamatan Caringin. Surat keputusan ini juga memiliki peranan penting dan strategis dalam proses pembentukan Destana karena surat keputusan ini berfungsi sebagai payung hukum yang memberikan legitimasi dan kekuatan hukum bagi pembentukan Destana dan tim relawan Destana di masing-masing Desa. Selain itu, surat ini juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Bentuk surat keputusan juga berguna sebagai landasan pembentukan tim relawan destana dengan susunan kepengurusan, tugas dan fungsi tim relawan serta biaya operasional yang dikeluarkan selama berjalannya program.

Penyebaran surat keputusan kepala desa kemudian disebarakan melalui Ketua RT atau RW setempat dengan tujuan tersebar sampai ke masyarakat sehingga memungkinkan informasi terkait Program Destana dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian masyarakat dapat memahami dan mengetahui tentang Program yang sedang dijalankan dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Program Destana. Penyebaran informasi terkait Destana juga senantiasa dilakukan melalui pesan sosial media via *whatsapp* sehingga informasi dapat sampai kepada masyarakat dengan cepat dan efektif serta memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan *up-to-date* tentang Program Destana. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan

kesiapan mereka dalam menghadapi bencana serta meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana.

5. Program Implementer (Pelaksana Program)

Dalam hal program implementer melihat apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci berdasarkan regulasi yang berlaku. Berdasarkan regulasi terkait Program Destana yaitu Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa atau Kelurahan Tangguh Bencana, pelaksana utama dalam Program Destana meliputi: BNPB; BPBD Provinsi/Kota/Kabupaten; Pemerintah Desa/Kelurahan; Masyarakat/Forum PRB; Fasilitator Destana.

Koordinasi yang dilakukan pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan Program Destana di Kecamatan Caringin dimulai dari BPBD Kabupaten Bogor untuk pembentukan Destana berdasarkan Perka BNPB No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa atau Kelurahan Tangguh Bencana. BPBD Kabupaten Bogor berperan sebagai inisiator dan penggerak utama dalam Program Destana. BPBD Kabupaten Bogor kemudian melakukan identifikasi dan seleksi desa-desa yang menjadi prioritas dalam penanganan bencana, dan kemudian memilih Kecamatan Caringin sebagai salah satu lokasi pelaksanaan Program Destana. Setelah itu, BPBD mengajukan rencana program kepada Kecamatan Caringin sebagai fasilitator program. Kemudian Kecamatan Caringin berkolaborasi dengan kepala desa dalam pembentukan surat keputusan sebagai bentuk legislasi atau payung hukum pelaksanaan Program Destana. Dalam surat keputusan yang dikeluarkan oleh kepala desa, dibentuk unit-unit tim relawan bencana yang beranggotakan masyarakat masing-masing 12 desa di Kecamatan Caringin. Peran masyarakat dalam Program Destana adalah sebagai subjek utama atau garda terdepan dalam pengurangan risiko bencana.

Dalam pelaksanaan Program Destana, masing-masing tim relawan Destana di tiap-tiap desa dibantu oleh BPBD Kabupaten Bogor, dan Unit Siaga SAR Bogor sebagai informan dan narasumber dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas masyarakat untuk pencegahan bencana. Masyarakat yang tergabung ke dalam tim relawan destana nantinya memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi bencana sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuan dalam mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana, serta memungkinkan mereka untuk menjadi lebih siap dan tangguh dalam menghadapi bencana yang mungkin terjadi.

Proses implementasi Program dianggap sesuai dengan tujuan kebijakan dimana Intervensi pihak instansi yang terlibat dalam Proses Implementasi Program Destana di Kecamatan bersifat sesedikit mungkin dan sebagai stimulan kepada masyarakat selaku pelaku utama program. dengan pendelegasian yang disesuaikan dengan kemampuan agen pelaksana yang terlibat dalam kebijakan, dimana program ini telah bersifat “dari”, “oleh”, dan “untuk” masyarakat.

6. Resource Committed (Sumber Daya yang Digunakan)

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan sahnya ditentukan oleh sumber daya yang tersedia. BPBD Kabupaten Bogor menyebutkan bahwa keharusan sumber daya yang digunakan dalam proses implementasi program meliputi sumber daya manusia yang kompeten, anggaran, infrastruktur dan teknologi serta kolaborasi dengan pihak lain sebagai dukungan dan pemberian dukungan yang prima dalam program berbasis masyarakat seperti Program Destana. Pada Program Destana, sumber daya yang

dikerahkan berupa sumber daya manusia yang berkualitas dan terlatih yang dapat berperan aktif dalam pelaksanaan program Destana. Hal tersebut memungkinkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Sedangkan pada pemerintahan desa menyangkut anggaran yang cukup untuk mendukung kegiatan pencegahan bencana serta pemenuhan kebutuhan penanganan bencana yang mendesak, seperti peralatan logistic dan fasilitas lainnya sehingga memungkinkan untuk meningkatkan respons dan penanganan bencana yang efektif. Dengan demikian, kombinasi sumber daya manusia dan anggaran yang efektif dapat meningkatkan kemampuan Kecamatan caringin dalam menghadapi bencana dan mengurangi risiko bencana, serta memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Sumber daya manusia di Kecamatan Caringin sudah mencukupi dalam hal jumlah dan tupoksi pembagian tugas terutama dalam melaksanakan mitigasi bencana. Kegiatan Program Destana sudah menyangkut pembentukan tim relawan Destana berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dimana tim relawan tersebut tergabung di masing-masing desa yang kemudian dikelompokkan kembali ke dalam beberapa unit. Unit-unit tersebut dibagi menjadi enam unit berdasarkan tupoksinya masing-masing dimulai dari cegah siaga, penyelamatan, pertolongan dan evakuasi, logistik, pos komando, keamanan hingga pengungsian dan pemulihan khusus pasca bencana. Pembagian tugas dalam unit tim relawan Destana menunjukkan bahwa tiap-tiap kepala desa telah mempertimbangkan aspek penting dalam penanggulangan bencana seperti kebutuhan logistik, penyelamatan, dan pertolongan pertama.

Pelatihan Program Destana diberikan kepada tim relawan Destana oleh narasumber terkait seperti BPBD Kabupaten Bogor, Unit Siaga SAR Bogor hingga Pemadam Kebakaran Sektor Ciawi sebagai bentuk kegiatan Program Destana berupa pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan. Selama berlangsungnya Program, pelatihan yang telah diberikan kepada tim relawan tersebut berupa pelatihan evakuasi dan pertolongan pertama dalam bentuk simulasi kepada anggota-anggota tim relawan. Namun dalam kegiatan pelatihan dan pengembangan kapasitas, masih diperlukan berbagai perbekalan kepada masyarakat untuk membantu masyarakat dalam permasalahan bencana mengingat masyarakat masih dalam tahap awam dan amatir sehingga para relawan tersebut belum memiliki pengalaman yang cukup dalam bidang mitigasi bencana. Selain itu, pelatihan mitigasi bencana harus dirancang secara rinci dan komprehensif, serta memerlukan tengat waktu yang cukup sehingga masyarakat dapat mendapatkan sertifikasi yang menunjukkan mereka mampu dan memahami konsep dan praktik mitigasi bencana. Kegiatan pelatihan juga memerlukan kolaborasi kompleks dengan instansi terkait seperti BPBD Kabupaten Bogor dan Unit Siaga SAR Bogor sebagai narasumber kegiatan sehingga masyarakat mendapatkan sertifikasi dan pengetahuan yang baik dalam mitigasi bencana. Hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam hal sumber daya manusia yang belum sepenuhnya mumpuni dalam Program Destana.

Selain sumber daya manusia, penyediaan sumber daya juga disebarkan sebagai bentuk anggaran dan sarana dan prasarana. Dalam hal ini, BPBD Kabupaten Bogor menerima alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagai sumber dana utama untuk melaksanakan berbagai kegiatan penanggulangan bencana, termasuk mitigasi, kesiapsiagaan, dan pencegahan bencana. Program Destana juga termasuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hal ini juga

didasarkan pada Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Dana Desa yang mengatur prioritas dan operasional penanggulangan Dana Desa, termasuk alokasi untuk penanggulangan bencana. Dengan demikian, APBD Kabupaten Bogor maupun APBDes menjadi sumber daya penting dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sedangkan Kecamatan Caringin berperan sebagai fasilitator program yang menyediakan segala keperluan program mulai dari pengadaan lapangan untuk pelatihan dan sosialisasi serta penanggung jawab pelaksanaan program.

Program Destana termasuk ke dalam rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah dikhususkan dalam alokasi dana untuk penanggulangan bencana sebesar 7.16% dari total anggaran APBDes Desa Cinagara. Rincian anggaran tersebut juga telah mencakup berbagai aspek termasuk pengadaan peralatan penanggulangan bencana, pembangunan infrastruktur, serta pelatihan dan pengembangan kapasitas masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen aparatur desa dalam meningkatkan ketahanan masyarakat desa terhadap bencana.

Lingkungan implementasi

1. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (Kekuatan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat)

Dalam implementasi kebijakan maupun program, kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat akan mempengaruhi pencapaian tujuan yang diinginkan dari suatu program. Mengacu pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa atau Kelurahan Tangguh Bencana, pengembangan Destana pada hakikatnya merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab yang pengaturannya diserahkan kepada masing-masing kepala desa yang diberikan. Agen pelaksana yang berperan sebagai fasilitator memberikan fasilitas berupa penyediaan sumber daya dan bantuan teknis yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk pemenuhan kegiatan Destana. Adapun bentuk kepentingan yang diutamakan dalam Implementasi Program Destana sejatinya berpaku pada masyarakat dan wajib membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai pelaku utama dalam pencegahan bencana.

Keterlibatan para aktor dalam implementasi Program Destana di Kecamatan Caringin ditunjukkan dengan keterlibatan BPBD Kabupaten Bogor sebagai unit pelaksana dalam pembentukan destana. BPBD Kabupaten Bogor juga memiliki peran dalam proses pengawasan pada tiap-tiap desa untuk memberikan hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi untuk desa Tangguh bencana. Aparatur Kecamatan Caringin yang ikut serta memberikan fasilitas program dengan penyebaran informasi terkait Destana dan penanggulangan bencana kepada masyarakat.

Mekanisme dalam kegiatan Destana dibahas dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang juga harus dilandasi dengan Peraturan Kepala Desa yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait Desa Tangguh Bencana. Adapun strategi khusus yang dilakukan oleh agen pelaksana dalam Program Destana di Kecamatan Caringin adalah dengan penyampaian Program Destana melalui sosialisasi kepada Masyarakat Kecamatan Caringin dengan harapan memberikan pengaruh yang signifikan dalam menentukan karakteristik agen pelaksana dalam berjalannya program. Dalam hal ini, agen pelaksana dalam implementasi Program Destana di Kecamatan Caringin telah memberikan pengaruh yang cukup besar pada pelaksanaan kebijakan karena dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan implementasi program.

Meskipun begitu, sering kali sosialisasi yang dilakukan instansi terkait Program Destana kepada masyarakat masih bersifat nonformal dan tidak resmi seperti penyebaran dalam bentuk tidak langsung dan bukan secara resmi dalam acara desa. Sosialisasi terkait Program Destana juga masih terbatas pada relawan Destana dan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga masih adanya kesenjangan dalam penyebaran informasi dan pemahaman tentang program destana.

2. *Institution and Regime Characteristic (Karakteristik Lembaga atau Rezim yang Berkuasa)*

Karakteristik suatu Lembaga menentukan arah kebijakan yang diambil dalam implementasinya. agen pelaksana kebijakan mulai dari BPBD Kabupaten Bogor, Kecamatan Caringin, Kepala Desa dan Masyarakat Kecamatan Caringin membangun karakteristik Program dengan mendukung, memfasilitasi dan berkolaborasi dengan baik dalam implementasi Program di lapangan. BPBD Kabupaten Bogor khususnya para Analis mitigasi bencana yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang penanggulangan bencana dianggap sangat informatif dalam memberikan informasi dan wawasan terkait pencegahan bencana dan mitigasi bencana. BPBD Kabupaten Bogor dapat memberikan penjelasan yang jelas dan akurat kepada masyarakat tentang cara-cara pencegahan bencana dan mitigasi bencana dimulai dari sektor rumah tangga.

BPBD Kabupaten Bogor juga senantiasa menghadirkan Unit Siaga SAR Bogor yang ikut membantu sebagai narasumber dan pengawas pelatihan dan pengembangan kapasitas masyarakat yang tergabung dalam tim relawan Destana dalam pelaksanaan Program Destana di Kecamatan Caringin. BPBD Kabupaten Bogor juga mampu berkolaborasi dan bekerja sama dengan Aparatur Kecamatan Caringin dalam peninjauan dan pemetaan risiko bencana dan identifikasi kebutuhan masyarakat untuk mengembangkan strategi mitigasi yang lebih efektif.

Meskipun begitu, terdapat kendala yang mempengaruhi karakteristik pelaksana program dalam Implementasi Program Destana di Kecamatan Caringin dimana para pelaksana kebijakan masih belum bersifat setara dan cenderung bergerak lambat dalam menjalankan program. Hal ini dibuktikan dengan pembentukan, penyebaran dan sosialisasi program yang masih belum optimal dimana penyebaran informasi masih banyak yang dilakukan tidak secara resmi dan nonformal dengan diselipkan di dalam kegiatan-kegiatan desa lain. Diperlukan penataan yang lebih baik seperti pengikutsertaan masyarakat luas guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman di seluruh lapisan masyarakat.

3. *Compliance and Responsiveness (Tingkat Kepatuhan dan Respon Pelaksana)*

Grindle menyebutkan bahwa terdapat hal yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan kebijakan, yaitu kepatuhan dalam proses pelaksanaan kebijakan. Unsur yang terlibat dalam Program Destana di Kecamatan Caringin mendukung dan berusaha bersungguh-sungguh dalam memastikan bahwa pelaksanaan Program dapat berjalan dengan baik dan tidak ada penyelewengan. Masyarakat Kecamatan Caringin juga memberikan respon baik terhadap pelaksanaan Program Destana dimana masyarakat merasa bahwa Program Destana dapat membantu masyarakat dalam persiapan bencana dan berorientasi terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain respon dari masyarakat, terdapat bentuk dukungan yang diukur sebagai daya tanggap dalam implementasi Program Destana. Bentuk dukungan dalam Program

Destana sering kali dilakukan dengan partisipasi aktif dalam semua tahapan seperti partisipasi aktif dalam tim relawan Destana, dukungan moril, hingga penerimaan informasi dengan baik terkait Program. Keterlibatan masyarakat dalam implementasi Program Destana dianggap penting dalam berjalannya program. Penyebaran informasi yang valid juga berperan penting dalam implementasi program karena bertujuan membangun kemandirian desa dalam menghadapi dan mengurangi risiko bencana melalui pemanfaatan sumber daya lokal dan kerja sama lintas sektor.

Meskipun begitu, masih terdapat beberapa tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat seperti kurangnya kesadaran tentang pentingnya mitigasi bencana, kurangnya pengetahuan tentang program dan kurangnya sumber daya untuk mendukung program. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen dari semua stakeholder dalam pelaksanaan Program Destana di Kecamatan Caringin seperti sosialisasi yang lebih luas, pelatihan yang lebih intensif, dan dukungan sumber daya yang lebih memadai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Destana di Kecamatan Caringin sebagai Kecamatan zona merah nomor satu di Kabupaten Bogor selama lima tahun terakhir sudah berjalan dengan baik diwujudkan dengan kontribusi positif berbagai pihak yang berperan dalam program terhadap peningkatan kapasitas kesiapsiagaan bencana sesuai dengan regulasi yang berlaku yaitu Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa atau Kelurahan Tangguh Bencana dan Standar Nasional Indonesia 8357:2017 tentang Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana. Program Destana di Kecamatan Caringin berjalan dengan pembentukan relawan destana di kedua belas desa di Kecamatan Caringin berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh kepala desa, pembagian tugas dan wewenang yang dibedakan ke dalam beberapa unit serta kriteria khusus bencana dalam APBDes. Meskipun begitu, implementasi masih belum sempurna dikarenakan masih terdapat beberapa kendala yang menghambat proses kegiatan Program Destana seperti kurangnya pengalaman, pelatihan dan pengembangan kapasitas dalam sumber daya manusia, kurangnya penyebaran program yang menghambat pengetahuan kebencanaan sampai ke tingkat rumah tangga, serta belum adanya kegiatan keberlanjutan dari Program Destana dari masing-masing desa.

REFERENSI

- Abdoellah&Rustiana.(2016).TeoridanAnalisisKebijakanPublik.Bandung:Alfabeta, CV.
- Agustino, L. (2022). Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Cet. 2). Alfabeta.
- Atwii, F., Sandvik, K. B., Kirch, L., Paragi, B., Radtke, K., Schneider, S., & Daniel Weller. (2022). *World Risk Report 2022*.
http://www.weltrisikobericht.de/uploads/media/WRR_2012_en_online.pdf
- Dasuki, R. E., & Amran, S. (2018). Konsep Kebijakan Dalam Pengawasan Dan Penerapan Sanksi Koperasi. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 1, 756–768. <https://doi.org/10.55916/frima.voi1.262>
- Igirisa, Irawaty. (2022). Kebijakan Publik. Yogyakarta. Tanah AirBeta.
- Miles, M., Huberman, M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis* (3rd ed.). SAGE.
- Moedani, Firman., Et, Al. (2024). Tata Kelola Program Desa Tangguh Bencana dalam Upaya Penanggulangan Bencana di Desa Cinta Asih Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Praxis Idealis (Vol. 1, Issue 1)*. <https://doi.org/10.36859/jp.v1i1.2553>.

- Padiku, Indhitya., Et, Al. (2024). Implementasi Program Desa Tangguh Bencana Pada Desa Rawan Banjir di Desa Mamungaa Timur. *Jurnal Devotion: Jurnal Pengabdian Masyarakat* (Vol. 3, Issue 2).
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa atau Kelurahan Tangguh Bencana.
- Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Dana Desa.
- Rima, Nabila Putri & Nasir Badruddin. (2025). Implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Pembangunan Sosial* (Vol 12, Issue 2).
- Suherman., Et, Al. (2025). Implementasi Kebijakan Program Destana Pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Sumedang. *Jurnal of Regional Public Administration* (Vol. 10, Issue 2). <https://ejournal.unsap.ac.id/index.php/jrpa>
- Susilastuti., Et. Al. (2025). Program Desa Tangguh Bencana (Destana) Sebagai Instrumen Pemberdayaan Masyarakat dn Penguatan Kesiapsiagaan Bencana. *Jurnal Qistina: Jurnal Multidisiplin Indonesia* (Vol. 4, Issue 2).
- Standar Nasional Indonesia 8357:2017 tentang Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana.
- Utami, Dwi., Et, Al. (2025). Implementasi Program Desa Tangguh Bencana dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Sosial: *Narrative Literature Review*. In *Jurnal Pendidikan Geosfer* (Vol. 10, Issue 2). <https://publications.usk.ac.id/index.php/JPG>